

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang.

Pemberdayaan merupakan suatu hal yang penting dalam perkembangan kehidupan manusia. Hal ini dikarenakan saat ini masih banyak masyarakat Indonesia dimana khususnya masyarakat pedesaan yang tidak memiliki akses terhadap perkembangan teknologi dan sumberdaya sehingga mereka sulit untuk berkembang. Pemberdayaan pada hakikatnya mencakup dua aspek yaitu *“to give authority to and to give ability to or enable”*. Dalam pengertian pertama, pemberdayaan memiliki makna memberi kekuasaan, mengalihkan kekuatan dan mendelegasikan otoritas ke pihak lain. Sedangkan dalam pengertian yang kedua, pemberdayaan diartikan sebagai upaya untuk memberi kemampuan atau keberdayaan menurut (Friedman, 1992 dalam Krisdayanti, 2016: 1).

Menurut (Chamber, 1995 dalam Kartasasmita, 1997:10) berpendapat bahwa pemberdayaan masyarakat adalah sebuah konsep pembangunan ekonomi yang yang merangkum nilai-nilai social. Konsep ini mencerminkan paradigma baru pembangunan, yakni bersifat *“people centered, participatory, empowering, and sustainable”*. Konsep ini lebih luas dari hanya semata-mata memenuhi kebutuhan dasar atau menyediakan mekanisme untuk mencegah proses pemiskinan lebih lanjut, yang pemikirannya akhir-akhir ini banyak dikembangkan sebagai upaya mencari alternative.

Pemberdayaan masyarakat adalah suatu upaya yang dilakukan untuk memperkuat kemampuan masyarakat sesuai dengan sumber-sumber daya masyarakat sendiri, dengan tujuan memandirikan masyarakat agar mampu memenuhi kebutuhan-kebutuhan dasar seperti pangan, sandang, perumahan, kesehatan, pendidikan, kesempatan kerja kemauan, kerohanian, relasi sosial, kebudayaan dan keadilan menurut (Bastaman, 2000 dalam Krisdayanti, 2016:1).

Dalam Islam, pemerataan pendapatan sudah disarankan melalui Al-Quran dan Hadist nabi dengan penerapan instrumen zakat. Al-Quran menjelaskan bahwa alokasi zakat sudah ditentukan kepada siapa para penerimanya, namun tidak

dijelaskan bagaimana zakat itu harus dikelola dalam bentuk pemberian uang konsumtif, barang, atau dalam bentuk modal usaha. Seiring dengan berkembangnya pemikiran ekonomi dari para ahli yang kemudian melahirkan berbagai ide mengenai pengelolaan zakat dan pada akhirnya muncul gagasan pendistribusian zakat secara produktif agar pada pendistribusiannya ke penerima zakat dapat memiliki dampak yang lebih bagi mustahik sehingga kaum penerima zakat terutama kaum miskin mampu terangkat perekonomiannya. Zakat merupakan bagian rangkaian ibadah dalam Islam yang bertujuan untuk mendistribusikan dan menjembatani kaum muzakki dan mustahik sehingga terjadi kesinambungan kehidupan ekonomi antara keduanya. Indonesia sebagai Negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia, yang memiliki lebih dari 200 juta jiwa muslim merupakan kekuatan besar dari sisi ekonomi. Dari jumlah populasi saja dapat dilihat bahwa Indonesia juga memiliki potensi zakat yang sangat besar untuk menunjang kehidupan ekonomi rakyat bawah (Sumatri, 2017:210).

Zakat Community Development (ZCD) yaitu kegiatan yang mengintegrasikan program-program untuk mengatasi masalah kesehatan, pendidikan, ekonomi dan masalah sosial, dengan menggunakan dana Zakat Infak Shodaqoh. Pendekatan Program ini terdiri atas pendekatan Komunitas yaitu pendekatan kelompok masyarakat yang terorganisir dan memiliki kesamaan aktifitas, pendekatan kewilayahan yaitu pendekatan lokasi sebagai sasaran program dengan permasalahan secara geografis dan kependudukan serta pendekatan wilayah sasaran program sesuai dengan kondisi masyarakat apakah perkotaan, perdesaan, pegunungan atau pesisir yang jelas membutuhkan penanganan yang berbeda (Mafruhah, 2015:70).

Berbagai hasil penelitian yang mengkaji tentang implementasi program-program pemberdayaan masyarakat tersebut dilaporkan adanya hasil dengan tingkat keberhasilan yang berbeda-beda dan bahkan juga ketidak-berhasilan. Salah satu permasalahan yang sering terjadi dalam suatu program pemberdayaan masyarakat yang kemudian berdampak pada berhasil atau tidaknya suatu program ialah mengenai peranan pendamping atau pekerja pengembang masyarakat dalam berbagai proses pemberdayaan masyarakat. Dalam suatu dimensi waktu tertentu,

seorang pekerja pengembangan masyarakat dapat berperan sebagai *enabler* atau *organizer* atau *educator* (Nasdian, 2014:236).

Peran pendamping di sini yang seharusnya dapat menjadi fasilitator, pendidik, utusan atau wakil dan juga sebagai teknikal yang baik dan mumpuni tidak jarang menghasilkan hasil yang bertentangan sehingga berpengaruh pada jalannya program pemberdayaan masyarakat itu sendiri. Mengacu pada Ife (1995), peran pendamping umumnya mencakup tiga peran utama, yaitu : fasilitator, pendidik, perwakilan masyarakat, dan peran-peran teknis bagi masyarakat miskin yang didampungnya. Salah satu dampak yang terjadi apabila pendamping atau pekerja pengembangan masyarakat tidak dapat menjalankan tugasnya dengan baik dan benar ialah berpengaruh pada tingkat partisipasi peserta program pemberdayaan masyarakat. (Fahmi 2009) menjelaskan bahwa masih banyak kalangan miskin dan pendidik rendah tidak cukup terlibat dalam partisipasi dan menjelaskan dimana partisipasi yang ada memang masih dipengaruhi oleh peran *stakeholder*.

Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) dapat dibentuk oleh kelompok masyarakat berdasarkan beberapa kesamaan kegiatan, profesi dan tujuan fungsi, seperti agama, pendidikan, budaya, ekonomi, hukum dan sebagainya. Ormas merupakan peran serta masyarakat dalam melaksanakan pembangunan untuk memajukan kehidupan yang berkeadilan dan kemakmuran. Kehadiran Organisasi Kemasyarakatan diharapkan mampu mewujudkan aspirasi dan kepentingan anggota masyarakat sebagai sarana untuk berkarya melaksanakan kegiatan yang bermanfaat bagi kepentingan bersama dengan berasaskan Pancasila. Eksistensi organisasi bagi sebagian kalangan adalah suatu yang mengasyikkan, karena selain merupakan wahana tempat beraktivitas, juga merupakan sarana penyaluran kehendak dan pemikiran baik dalam tataran internal organisasi, maupun dalam kerangka penyaluran pemikiran dan pendapat dalam lingkup kehidupan bernegara. Penyaluran aspirasi melalui organisasi, diyakini memperoleh perhatian selain akan lebih teratur dan terarah, karena suara yang disampaikan merupakan suara dari organisasi bukan atas nama pribadi, dan membawa kepentingan anggotanya (Nugraha, 2011:2)

Salah satunya adalah PKPU HI yang berfokus pada pengelolaan dana kemanusiaan dan memiliki visi menjadi organisasi kemanusiaan dunia yang terpercaya dalam membangun kemandirian. Misi dari organisasi ini adalah pertama mendayagunakan program kegawatdaruratan, pemulihan dan pemberdayaan dalam meningkatkan kualitas dan kemandirian penerima manfaat, kedua menjalin kemitraan dan kolaborasi antar manusia, dunia usaha, pemerintah, media, dunia akademis dan organisasi masyarakat sipil (*Civil Society Organization- CSO*) lainnya atas dasar keselarasan nilai-nilai yang dianut lembaga, ketiga melakukan kegiatan studi, riset pengembangan dan pembangunan kapasitas yang relevan bagi peningkatan efektivitas peran organisasi masyarakat sipil dalam memberi alternative solusi dan/atau inovasi terhadap krisis kemanusiaan yang berlarut-larut, selanjutnya adalah membangun kapasitas dan kompetensi organisasi yang efektif, inovatif, akuntabel dan berorientasi pada kualitas pelayanan, dan misi yang terakhir adalah mengembangkan program-program yang bersifat advokasi baik secara mikro, meso dan makro guna mendorong keadilan dan kesetaraan masyarakat (pkpu.org)

B. Rumusan Masalah

Kecamatan Pauh merupakan salah satu kecamatan yang terdapat di kota Padang Sumatera Barat Indonesia yang terdiri dari 9 kelurahan, yaitu Kelurahan Pisang, Biniang Kp.Dalam, Piai Tengah,Cupak Tengah, Kapalo Koto, Koto Luar, Lambung Bukit, Limau Manis Selatan, Limau Manis. Dari 9 kelurahan tersebut kelurahan Lambung Bukit dilihat sebagai wilayah program Bangun Industri Desa oleh PKPU HI, alasan pemilihan kelurahan Lambung sebagai kelurahan yang mayoritas mata pencaharian masyarakatnya tergantung pada alam dan berada di sub-sektor pertanian tanaman pangan, hortikultura, perikanan, dan usaha mikro.

Program Bangun Industri Desa (BID) didampingi oleh PKPU HI Sumatera Barat. Untuk fokus pendampingan dilaksanakan di Kampung Pinang Kelurahan Labung Bukit dengan kajian potensi wilayah dan kebutuhan masyarakat setempat karena kondisinya di nagari tersebut belum memanfaatkan potensi yang ada di nagari. Dari hasil pengkajian dan didasarkan pada sejarah nagari bahwa wilayah tersebut cocok dijadikan wilayah pembibitan ikan. Proses pemberdayaan ekonomi

dilakukan dengan memberdayakan pemuda dalam pengelolaan lele bioflok, yang hasil panennya dikelola oleh kelompok ibu rumah tangga yang melakukan pengolahan menjadi lele kering . Kelompok pemuda disini adalah pemuda-pemuda yang belum memiliki pekerjaan dan ibuk PKK yang terdiri dari ibu-ibu yang termasuk kedalam rumah tangga miskin.

Dalam melakukan program pendampingan tidak terlepas dari permasalahan yang ada. Dari survei di lapangan, diketahui pendampingan dilakukan oleh satu orang dari PKPU HI dan satu asisten yang ditunjuk oleh pendamping untuk memfasilitasi Kampung Pinang dalam budidaya lele bioflok. Masyarakat yang aktif mengikuti pendampingan sejumlah 11 yang terdiri dari 9 ibuk PKK dan 2 orang kelompok pemuda.

PKPU HI bersama masyarakat dampingan tersebut untuk mengikuti pelatihan pengenalan lele bioflok dimaksudkan untuk memperkuat semangat kelompok pemuda yang sudah sangat siap untuk memulai mengelola usaha kelompok. Pelatihan diawali dengan pengenalan budidaya lele bioflok sebagai salah satu teknologi budidaya lele yang ramah untuk lingkup rumah tangga. Selanjutnya juga dijelaskan mengenai tahapan mulai dari penyiapan lahan, perakitan sampai dengan proses penyebaran bibit lele. Pelatihan ditutup dengan meninjau langsung lokasi yang akan disiapkan untuk melakukan usaha budidaya lele bioflok. Setelah pelatihan, kelompok pemuda langsung melakukan pembuatan instalasi lele bioflok dana awal dari PKPU HI yang akan disemai 6000 bibit lele di 2 kolam yang telah dibuat. Pada panen pertama yaitu panen lele mencapai 250 kg yang nantinya akan dikelola oleh kelompok ibu rumah tangga dengan melakukan wirausaha lele kering.

Hasil FGD bersama dengan kelompok pemuda dan pengolah panganan lele menyatakan pendampingan yang dilakukan oleh fasilitator sangat membantu mengorganisasi dan memotivasi pelaksanaan usaha. Hanya saja sampai saat ini proses administrasi dan pencatatan masih terus dibenahi berhubung seluruh anggota kelompok semuanya masih baru belajar dan butuh waktu pendampingan yang lebih intens dan sering..

Dari pemaparan yang dijelaskan di atas, terlihat bahwa penerima manfaat perlu mendapat pendampingan lebih intensif dari pendamping. Hal ini yang melandasi peneliti untuk melakukan penelitian terhadap peran pendampingan yang dilakukan PKPU HI terhadap Program Bangun Industri Desa di Kampung Pinang. Sehingga penelitian ini diharapkan dapat membantu PKPU HI untuk mengetahui bagaimana persepsi penerima manfaat terhadap pendampingan tersebut, apakah sudah sesuai dengan harapan dan kebutuhan penerima manfaat.

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka timbul pertanyaan penelitian bagaimana peran pendampingan PKPU HI dalam pelaksanaan Program Bangun Industri Desa di Kampung Pinang serta bagaimana persepsi penerima manfaat terhadap pendampingan tersebut? Dengan demikian, penulis merasa perlu melakukan penelitian judul “Peran Pendampingan dalam Program Bangun Industri Desa Oleh PKPU HI di Kampung Pinang Kelurahan Lambung Bukit Kecamatan Pauh”.

C. Tujuan

Penelitian ini bertujuan untuk:

1. Mendeskripsikan peran pendamping dalam pelaksanaan program Bangun Industri Desa di Kampung Pinang oleh PKPU HI
2. Mendeskripsikan persepsi penerima manfaat program terkait peran pendamping dalam program Bangun Industri Desa di Kampung Pinang oleh PKPU HI

D. Manfaat

1. Menambah khasanah pengetahuan tentang pendampingan program Bangun Industri Desa di Kampung Pinang
2. Memberi informasi kepada masyarakat tentang budidaya dan pengolahan lele
3. Sebagai acuan bagi penelitian sejenis pada waktu yang akan datang
4. Sebagai bahan masukan bagi PKPU HI Sumbar